

# Ketidakpastian Global Tekan Prospek Ekonomi

Ketidakpastian global yang dipicu kebijakan tarif Trump berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan penyaluran kredit.

JAKARTA, KOMPAS — Ketidakpastian yang dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi itu juga dapat merambat pada prospek perekonomian Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjoyo mengatakan, dinamika kebijakan tarif resiproskal AS yang disusul dengan retaliasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia.

"Adaptasinya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan akan menurun, dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4/2025).

Melalui RDG itu, BI juga memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75 persen. Ini dilakukan guna menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 persen dan stabilitas nilai tukar di tengah makin meningkatnya ketidakpastian, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara langsung, Perry melanjutkan, kebijakan tarif AS akan berdampak kepada Indonesia. Dari jalur perdagangan, permintaan ekspor ke AS diperkirakan menurun seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi AS.

Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung juga dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sedikit di bawah titik tengah dalam kisaran 4,7-5,5 persen. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di bawah 5,3 persen.

Menurut Perry, ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan. Pertumbuhan kredit pada 2025 diperkirakan hanya 9 persen atau dalam batas bawah target pertumbuhan BI sebesar 11-13 persen.

"Ada sektor-sektor yang mungkin masih bisa mening-

katkan ekspor, tetapi ada juga sektor-sektor yang akan terdampak dari sisi permintaan," ujarnya.

Per Maret 2025, penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 9,16 persen secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh 10,3 persen. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (*lending standard*) dan kondisi likuiditas perbankan dinilai masih memadai.

Di lain pihak, dari sisi penawaran, kontribusi pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial. Sementara itu, kontribusi pertumbuhan kredit pada sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas.

Oleh sebab itu, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, antara lain mengoptimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (DPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Gubernur BI Junda Agung menambahkan, pertumbuhan kredit pada Maret 2025 memang lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, perlambatan ini belum mencerminkan pelemahan yang mendasar pada intermediasi perbankan.

"Indeks *lending standard* terkait persyaratan-persyaratan kredit, seperti agunan, suku bunga, dan persyaratan lain, belum ada tanda-tanda pengetatan. Lalu, apakah bank sudah selektif, kriterianya persyaratan masih longgar atau belum terlalu selektif," kata Junda.

Di sisi lain, ruang likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK masih memadai, yakni sebesar 26 persen. Bank-bank yang likuiditasnya ketat dapat memanfaatkan pendanaan dari luar negeri atau dana non-DPK.

## Jaga nilai tukar

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Whoso, mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga mencerminkan bahwa BI memilih untuk tidak menggunakan instrumen suku bunga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Menurut saya, pertama, karena BI lebih memilih

membeli Surat Berharga Negara (SBN), yang per 22 April telah mencapai Rp 80,98 triliun. Kedua, karena nilai dollar AS juga tengah melemah di pasar global akibat perang tarif," kata Dradjad yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Dradjad menambahkan, yang perlu menjadi perhatian, melalui skema *burden sharing*, jumlah SBN yang dimiliki BI telah mencapai Rp 1,104,85 triliun, menjadikannya sebagai pembeli terbesar SBN, sekitar 28 persen dari total *outstanding* pada saat itu. Jika pada tahun 2025 BI kembali membeli SBN senilai Rp 150 triliun, peran BI akan semakin dominan.

"Pertanyaannya, apakah BI akan terus menyimpan SBN tersebut atau akan dijual ke pasar? Bagaimana pasar menilai kelanjutan kebijakan *quantitative easing* BI? Hal ini perlu diwaspadai," ujar Dradjad.

## Likuiditas perbankan

Dibubungi secara terpisah, ekonom Bank Danamon, Hossanna Evalita Situmorang, mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya permintaan. Perlambatan tersebut terjadi akibat suku bunga tinggi dan kebutuhan rumah tangga serta dunia usaha.

"Terdapat faktor penyeimbang yang perlu dicermati, yakni jatuh tempo sejumlah besar Sekuritas Bank Indonesia (SBI) pada periode Mei-Juli 2025, yang merupakan efek dari *issuance* besar pada periode yang sama tahun lalu. Penambahan likuiditas ini diharapkan dapat mendukung kapasitas penyaluran kredit perbankan," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Ia menambahkan, KLM BI turut memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas perbankan. Namun, akselerasi kredit tetap bergantung pada pemulihan permintaan yang memerlukan waktu, terutama dengan tekanan global dan suku bunga global yang masih tinggi.

Dalam kesempatan lain, Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja meyakini, kebijakan moneter yang diambil oleh BI telah sesuai dengan kondisi perekonomian terkini. Namun, ia berharap, BI dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung prospek dunia bisnis.

Selain itu, ia juga berharap, likuiditas perbankan dapat terus terjaga di tengah tekanan perekonomian global. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan likuiditas industri perbankan cenderung megetat.

"Memang kalau bicara likuiditas secara industri agak lebih *tight* (ketat). Kalau diamati, *loan to deposit ratio* (LDR) industri (perbankan), dari sekitar 84 persen pada 2023 bergeser menjadi hampir 89 persen pada akhir 2024," katanya dalam konferensi pers paparan kinerja triwulan 1-2025 secara virtual.

Meski masih tergolong memadai, rasio tersebut menggambarkan tingkat likuiditas industri perbankan yang semakin ketat. Sebab, dalam kondisi normal, LDR industri perbankan biasanya berada dalam kisaran 82 persen.

Menurut Jahja, setiap bank memang memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam penghimpunan DPK maupun penyaluran kredit. Adapun BCA menargetkan pertumbuhan kredit pada 2025 sebesar 6-8 persen dengan pertumbuhan DPK sebesar 6-7 persen.

Lebih lanjut, penghimpunan DPK dalam bentuk deposito individu cenderung lebih berat dibandingkan dengan dana murah. Ini terjadi lantaran bunga deposito bank kurang kompetitif dibandingkan dengan imbal hasil yang ditawarkan oleh instrumen investasi lainnya.

Per triwulan 1-2025, BCA dan entitas anak membukukan laba Rp 14,3 triliun atau tumbuh 9,8 persen secara tahunan. Capaian ini, antara lain, ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 12,6 persen secara tahunan menjadi Rp 941 triliun, dengan pertumbuhan DPK sebesar 6,5 persen secara tahunan menjadi Rp 1.193 triliun.

Sementara itu, PT Bank Permata Tbk pada periode yang sama mencatatkan laba sebesar Rp 788,97 miliar atau turun 2,27 persen secara tahunan. Ini ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 6 persen secara tahunan menjadi Rp 156,6 triliun, dengan pertumbuhan DPK sebesar 4,84 persen secara tahunan menjadi Rp 187,41 triliun.

Direktur Utama Permata Bank Melita M Rusli menegaskan, pihaknya senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam setiap aspek penyaluran kredit sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Langkah ini, menurut dia, merupakan fondasi penting dalam memastikan stabilitas kinerja bank di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

"Fokus kami tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga menciptakan nilai bermakna yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya dalam siaran pers.

(GPN)



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirat dan CEO Lippo Group James Riady bertemu para konsumen Meikarta setelah pertemuan media pengaduan konsumen Meikarta dengan pihak Meikarta di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

## Ketidakpastian Global Tekan Prospek Ekonomi

Ketidakpastian global yang dipicu kebijakan tarif Trump berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan penyaluran kredit.

**JAKARTA, KOMPAS** – Ketidakpastian yang dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi ini juga dapat meruntuhkan pasar keuangan Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajoy mengemukakan, disamping kebijakan tarif resiprokal AS yang disusul dengan retaliasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 di prakirakan akan meremah, dari 5,2 persen menjadi 2,9 persen, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut, katanya dalam konferensi pers hari Rabu Dewan Gubernur (DGG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4/2025).

Melalui DGG itu, BI juga memutuskan untuk kembali memperketat kebijakan suku bunga melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung juga dapat memunculkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sekitar 2,9 persen, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut, katanya dalam konferensi pers hari Rabu Dewan Gubernur (DGG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4/2025).

Melalui DGG itu, BI juga memutuskan untuk kembali memperketat kebijakan suku bunga melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

menyebutkan, Survei Berbasis Negara (SBN), yang per 22 April telah mencapai Rp 80,98 triliun. Kedua, karena nilai dolar AS juga tengah melemah di pasar global akibat perang tarif, kata Dradjat, yang juga menjadi Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Dradjat menambahkan, yang perlu menjadi perhatian, melalui skema *hardend* oleh bank SBN yang dimiliki BI telah mencapai Rp 1.048,8 triliun, menjadikannya sebagai pembeli terbesar SBN, sekitar 28 persen dari total *outflow* pada saat itu. Jika pada tahun 2025 BI kembali membeli SBN senilai Rp 150 triliun, peran BI akan semakin dominan.

Oleh sebab itu, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, antara lain mengoptimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (OLM) untuk mendukung kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan melalui implementasi ketentuan rasio pendanaan hutang (RPHN) untuk mendukung pendanaan perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

## Ekonomi&Bisnis

9

e-mail: desk.ekonomi@kompas.id

### PROYEK MEIKARTA

#### Maruarar Pertemuan Lippo dan Konsumen

**JAKARTA, KOMPAS** – Pimpinan Lippo Group memenuhi panggilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendiskusikan tren dan masalah pembangunan Meikarta. Proses pengembalian dana konsumen yang melapor lewat Kementerian itu dijanjikan tuntas pada Juli 2025.

Vice Chairman Lippo Group PT Lippo Karawaci Tbk John Riady menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirat membahas tindak lanjut masalah Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, diwakili penyelesaian bagi 118 konsumen yang telah melaporkan pengaduan terkait unit Meikarta.

James menjabarkan proses pengembalian dana atau *refund* bagi konsumen Meikarta yang melapor itu dapat dilakukan sebelum Juli 2025. Ia mengemukakan akan mengoptimalkan proses penyelesaian lebih cepat. Kuncinya adalah dokumen yang lengkap. "Kalau bisa menyerahkan lebih cepat, urusan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Maruar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitri Nur mengemukakan, sebanyak 118 konsumen Meikarta melapor ke layanan Benar-PKP sejak 27 Maret hingga 27 April 2025. Hari ini, 102 orang telah menyerahkan dokumen dengan nilai pembayaran mencapai Rp 26,85 miliar, sementara 16 lainnya belum melengkapi data hingga batas waktu.

Dari 118 pelapor, 2 konsumen meminta serah terima unit dan sedang diproses, 88 meminta

pengembalian uang, 4 menginginkan uang kembali atau unit, sementara 23 belum menentukan jenis pengaduan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirat mengemukakan, pihaknya meminta pihak Meikarta mengembalikan dana yang sudah dibayarkan sejumlah 102 konsumen untuk penyesuaian apartemen Meikarta senilai Rp 26,85 miliar. Pengembalian dana 102 konsumen diharapkan selesai bertahap dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat 23 Juli 2025.

Sementara itu, sejumlah 16 konsumen yang belum melengkapi dokumen dan data administrasi diminta menyelesaikan paling lambat tanggal 1 Mei 2025, melalui layanan Benar-PKP. Layanan Benar-PKP diumumkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 26 Maret 2025 sebagai kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan.

"Penyelesaian masalah Meikarta ada dua, yakni menunggai apartemen selesai dibangun atau uang (konsumen) kembali," kata Maruar.

Phiadnya menargetkan pertemuan kembali dengan John pada awal Juni, begitu pula dengan para korban. Juli mendatang, setidaknya seluruh korban yang terdampak dalam aplikasi Pengaduan Konsumen Terhadap Rumah dan Asisten Rumah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan atau Benar-PKP sudah mendapatkan haknya.

#### Proyek dilanjutkan

Menurut James, dari data terakhir, sektor 20.000 unit telah dibangun di Meikarta. Pembangunan biasanya tidak mu-

dah dilakukan karena tersandung persoalan lahan, tetapi itu pun mampu diantisipasi. Komponen-komponen itu menentukan pembangunan sebuah kota baru.

"(Terdapat) kedarif yang sulit itu adalah infrastruktur, tetapi infrastruktur itu sudah selesai. Itu bukan hal yang kecil. Lahan kelas menengah kelas baru, biasanya itu pertama adalah pembangunan 1.000 unit yang paling penting agar menjadi satu komunitas," tutur James.

Pengembang juga dinilai memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh pembangunan. Pendanaan bukan menjadi mata air karena biaya kasi pengembangan tidak berat untuk ketika membangun.

John Riady dalam kesempatan yang sama menegaskan, proyek Meikarta akan terus dilanjutkan. Saat ini, Maruar apakah masih menargetkan proyek baru di Meikarta. John mengemukakan, "Sementara ini tidak, kami fokus (melanjutkan) yang sudah ada."

Dalam kesempatan yang sama, konsumen apartemen Meikarta, Sufren and Tanggung, mengatakan telah membeli sebuah unit pada 2017. Serah terima kunci sementara berlangsung pada 2019.

"Saya sudah bolak-balik ke Meikarta selama (pandemi) Covid-19 tanpa perkembangan apapun. Harga unit saya di atas Rp 365 juta. Saya bayar cash bertahap. Sekarang saya minta *full refund* karena sudah tidak percaya lagi dengan Meikarta. Saya ingin balik saya uang saya," kata Sufren.

Ia berharap agar kesepakatan antara pemerintah dan pengembang Meikarta tidak seadanya janji. GAT:AYD

### Diskusi Peluncuran Buku "Gajah Tidur yang Terbangun"



Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk Susanto Djaia (tengah) mengemukakan perjalanan perusahaan yang diunggulkan dalam diskusi peluncuran buku 'Gajah Tidur yang Terbangun: 50 Tahun Inovasi Digital Metrodata' di Toko Buku Gramedia Mai Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Hadir pula penulis buku itu, Nugroho Dewanto Kurno. Buku diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas.

### TENDER TERBUKA UNTUK LAYANAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA MIGRANT

**Kami mencari agen perekrutan (API) untuk menyediakan layanan perekrutan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk operasi kelapa sawit di seluruh Malaysia**

**Persyaratan Agen Perekrutan**

- Berbasis di Indonesia
- Memiliki dan diawasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

**Persyaratan Pekerja**

- Berbasis di Indonesia
- Sebagai Pekerja Perkebunan Sawit

Hanya AP terpilih yang akan dipanggil untuk tender. AP yang berhasil akan dipilih untuk berpartisipasi dalam program Pelatihan dan Pendampingan Rekrutmen Berjangka waktu SD Guthrie Berhad.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi [www.recruitment@sdguthrie.com](mailto:www.recruitment@sdguthrie.com)

Pin kode QR di sebelah ATAU kunjungi <https://forms.gle/74uH0c9V6TnXa87> untuk mengimprimasi aplikasi anda. Semua Agen Perekrutan yang tertarik harus mengirimkan aplikasi mereka sebelum 5 Mei 2025 (Senin).